

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
PERTANIAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS BANTU PENYULUHAN
PERTANIAN (UPTB-PP) KAMPUNG KEMUNING MUDA KECAMATAN
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK TAHUN 2019**

Oleh :Muhammad Aras

Dosen Pembimbing :

Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The existence of the delegation of governmental authority to the regions in the era of autonomy and decentralization has a logical consequence in which the Regional Government is required to have adequate sources of funding, to assume responsibility for governance in ensuring regional independence and welfare. The implementation of regional governance is directed at efforts to empower the community (civil development) so that they are able to manage their resources according to local interests, priorities and potentials. So that the regions will be more advanced, independent, prosperous and competitive in the implementation of government and regional development. One of them is in the agricultural sector.

This study aims to describe the evaluation of agricultural guidance and counseling programs in Bungaraya District, Siak Regency in 2019 and describe the inhibiting factors for evaluating agricultural guidance and extension programs in Bungaraya District, Siak Regency in 2019. This data collection technique was carried out by interview and documentation. The method used in this research is descriptive qualitative.

The results showed that the success of the program implemented by UPTB PP Kampung Kemuning Muda, Bungaraya Subdistrict, Siak Regency in the form of counseling and coaching based on previously made objectives has benchmarks, where benchmarks are achieved properly by the resources managing them. With these benchmarks, it is necessary to evaluate the counseling and coaching carried out by the UPTB PP Kampung Kemuning Muda, Bungaraya District, Siak Regency. The success of the evaluation of the extension and guidance program policies carried out by UPTB PP Bungaraya Subdistrict together with related agencies, still encounters several obstacles, these internal and external obstacles come from the farmers / farmer groups themselves. The inhibiting factors for the evaluation of agricultural guidance and counseling programs in Bungaraya District, Siak Regency consist of external factors and internal factors. Internal factors in the limitations of the inadequate agricultural guidance and extension program (number and capacity) then external factors related to the importance of the availability of facilities and infrastructure for the Agricultural Development and Extension Program in the prevailing laws and regulations.

Keywords: Evaluation, Development and Agricultural Extension

PENDAHULUAN

Adanya pelimpahan kewenangan Pemerintahan kepada daerah di era otonomi dan desentralisasi menimbulkan konsekuensi logis dimana Pemerintah Daerah dituntut harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai, untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan dalam menjamin kemandirian dan kesejahteraan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (*civil development*) agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi lokal. Sehingga daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif dalam pelaksanaan Pemerintahan maupun pembangunan daerahnya. Salah satunya adalah pada sektor pertanian.

Dalam proses pembangunan pertanian yang berhasil dengan peranan besar sebagai ujung tombak pembangunan pertanian dilakukan oleh kelompok tani¹ Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten penghasil padi terbesar ketujuh di Riau dengan produksi mencapai 8.738 ton. Sentra produksi padi yang terbesar di Kabupaten Siak adalah di Kecamatan Bungaraya. Hasil produksi Gabah Basah Panen (GBP) di Bungaraya dapat mencapai 7-8 ton per hektar yang menghasilkan beras sebesar 2-4 ton²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak dilihat dari luas tanam, produktivitas, dan produksi padi di Kecamatan Bungaraya tahun 2012-2019

menunjukkan bahwa tahun 2018 produksi padi Kecamatan Bungaraya adalah yang tertinggi yakni sebesar 27.100 Ton dengan luas tanam 5.325 Ha dan produktivitas 51 Kw. Tahun 2019 jumlah produksinya menurun menjadi 27.003 Ton dengan luas lahan 4.420 Ha, namun produktivitasnya meningkat menjadi 61 Kw. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun produksi dan luas tanam padi Kecamatan Bungaraya tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2017, namun produktivitasnya lebih tinggi dari tahun 2018. Artinya, produktivitas padi Kecamatan Bungaraya terus membaik. Berdasarkan data UPTB-PP Bungaraya tahun 2018 antara Kampung Kemuning Muda dan Kampung Bungaraya juga terlihat bahwa produktivitas dua desa tersebut sama yakni 51 Kw. Namun, Kampung Bungaraya memiliki lahan yang lebih sedikit dari Kampung Kemuning Muda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada subsistem agribisnis yang belum berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada produktivitas padi di Kampung Kemuning Muda tersebut. Jika dikaitkan dengan program pemerintah daerah melalui UPTB-PP Kecamatan Bungaraya kelompok tani telah mendapatkan penyuluhan dan pembinaan, namun dirasakan belum maksimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani, masih rendahnya pengetahuan kelompok tani yang ada di Kecamatan Bungaraya dalam pemanfaatan lahan yang tersedia, sehingga masih banyak kelompok tani yang memiliki sedikit pengetahuan atau dapat

¹ Mardikanto, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers) 115

² Data BPS Provinsi Riau tahun 2019

dikatakan belum maksimalnya penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh badan ketahanan pangan Kabupaten Siak. Sementara itu Sentra produksi padi yang terbesar di Kabupaten Siak adalah di Kecamatan Bungaraya. Dalam kasus ini pelaksanaan tugas dilapangan belum terlihat. Penyuluhan teknologi pertanian dan rekomendasi pemasaran hasil produksi pertanian tidak dilakukan secara berkala dan kurangnya kontrol terhadap saluran pemasaran hasil pertanian, distribusi pupuk bersubsidi dan dana bantuan yang disalurkan pemerintah tidak merata dan sering terlambat.

KERANGKA TEORI

Evaluasi

Evaluasi merupakan metode untuk mengkaji keberhasilan suatu aktivitas tertentu, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan lagi hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya.³ Menurut Van den Ban dan Hawkins evaluasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses.⁴ Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga relevansi dan efek serta konsekuensinya ditentukan secara sistematis dan seobjektif mungkin. Evaluasi penyuluhan pertanian digunakan untuk memperbaiki kegiatan sekarang dan yang akan datang seperti dalam perencanaan program, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program untuk mencapai kebijaksanaan penyuluhan yang lebih efektif.

Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara umum

evaluasi terhadap suatu program dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu:⁵

1. Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menerapkan prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, didalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan.
3. Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi bertujuan untuk:⁶
 1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. Yaitu tujuan dalam mengevaluasi suatu program dengan pencapaian dari evaluasi itu sendiri
 2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran. Dampak yang diukur adalah dampak negatif dan dampak positif terhadap keberhasilan dari

⁵ Siagian, Matias & Suriadi, Agus.2010. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial. Medan: FISIP USU Press. hal 45

⁶ Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, hal 112

³ Harsono.2002. Implementasi Kebijakan dan Politik.Bandung: Mutiara Sumber Widya hal 69

⁴ *Ibid* hal 42

evaluasi

Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang menantinya dijadikan penilaian suatu program. Berhasil atau tidaknya program berdasarkan tujuan yang dibuat sebelumnya harus memiliki tolak ukur, dimana tolak ukur ini harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya.

Konsep Kebijakan

Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan⁷ Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat⁸

Evaluasi Kebijakan

Teori Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak¹⁸. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.⁹

Dalam hal ini, evaluasi

mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.¹⁰

Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang

⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2010. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI) 12

⁸ *Ibid*

⁹ Anderson dkk. 1975. Equity in health service : empirical analysis in sosial policy. (Cambridge: Ballinger) 54

¹⁰ Bardach, E. 2008. A Practical Guide for Policy Analysts: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving. Third Edition. CQ Press, (1-10)

direncanakan¹¹

Konsep Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil¹²

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹³ Terakhir implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara dan dokumentasi pada dilakukan wilayah kerja pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.berdasrakan teori evaluasi Siagian, Matias & Suriadi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi. Dengan hasil empiris yang ditemukan yaitu:

Berdasarkan studi pendahuluan, diperoleh data dan informasi kondisi awal program penyuluhan petani di UPTB-PP Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, seperti pada tabel berikut :

Kondisi Informasi	Awal
Perencanaan	1.1 Materi penyuluhan yang direncanakan bersifat terpusat, sebagian besar kurikulum sudah dipaket terpusat 1.2 Ragam informasi masih terbatas pada informasi pra panen, sedangkan pascapanen dan perluasan usaha lainnya belum tampak 1.3 Permasalahan usaha tani, perekonomian masyarakat, dan persoalan sosial anggota kelompok tani belum teridentifikasi 1.4 Anggota kelompok tani tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengembangan program penyuluhan

¹¹ Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo. (297)

¹² Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., (295)

¹³ Setiawan, 2004, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, (43)

¹⁴ Usman, 2002 "Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas," Jurnal Administrasi Publik, (326)

<p>Pengorganisasian Kegiatan</p>	<p>2.1 Belum terbangunnya budaya kerjasama antar anggota, dan kelompok dalam kegiatan pembelajaran, dan kegiatan usaha tani</p> <p>2.2 Belum terbinanya kerjasama dengan trans organisasi/kelembagaan lain selain di bidang pertanian</p> <p>2.3 Pengorganisasian internal kelompok masih lemah (struktur kel, fungsi kel, pembinaan kel, kekompakan kel, suasana kel, tekanan kel, dan efektivitas kel)</p>
<p>Pelaksanaan ::</p>	<p>3.1 Penyuluhan yang dilaksanakan bersifat konvensional, dan belum mampu membangkitkan dinamika pembelajaran, dinamika berusaha, dan dinamika bekerjasama.</p> <p>3.2 Materi yang dibahas belum menyentuh permasalahan dan kebutuhan mendasar kelompok tani, masih terbatas pada dimensi budidaya tanamansaja</p>

	<p>3.3 Belum ada materi yang mampu membahas atau Membangkitkan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, kemandirian, dan membangun</p>
<p>Waktu Pelaksanaan penyuluhan</p>	<p>4.1 Pelaksanaan penyuluhan tidak terjadwal baik dan hanya sebatas memberikan informasi saja.</p> <p>4.2 Waktu kunjungan UPTB-PP ke kelompok tani tidak terjadwal dan waktunya relatif singkat</p> <p>4.3 Tidak pernah melakukan field trip atau karyawisata kepada kelompok tani yang relatif sudah maju</p>
<p>Evaluasi</p>	<p>5.1 Belum optimalnya kegiatan pembelajaran dan kerjasama antar anggota, kelompok dan pihak instansi terkait/trans lembaga lain</p> <p>5.2 Substansi penyuluhan hanya mengutamakan kepada budidaya tanaman saja</p>

	<p>(prapanen), pascapanen dan aspek lain yang mengarah ke arah kemandirian usaha tani belum terprogram.</p> <p>5.3 Kelompok tani, belum memiliki budaya kerjasama antar lembaga, serta rujukan usaha tani sukses sebagai mitra usaha, sehingga seringkali menurunnya motivasi kerja/produksi.</p> <p>5.4. UPTB-PP belum memiliki instrumen evaluasi yang relevan dengan substansi yang dinilai, serta</p> <p>5.5. Petani belum terlibat dalam kegiatan refleksi dan evaluasi program</p>
--	--

Berdasarkan Data empirik diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh UPTB-PP Kampung Kemuning Muda telah dilaksanakan cukup baik, namun masih perlu berkelanjutan agar hasil penyuluhan lebih maksimal.

Evaluasi Program

Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2019

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pembinaan Dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak secara input termasuk dalam 59 kategori cukup berhasil, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk menyajikan beragam hal materi yang disampaikan maupun sarana yang disediakan pada saat kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sebagai kelengkapan untuk tercapainya tujuan program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak belum semuanya terpenuhi. Seperti kurangnya jumlah penyuluh, sehingga petani merasa kurang diperhatikan terutama ketika di saat mengalami kesulitan dalam mengendalikan hama dan penyakit.

Penilaian atas Perencanaan Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2019

Untuk melihat penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dibawah naungan Badan ketahanan pangan Kabupaten Siak dan Dinas Pertanian Kabupaten Siak adalah berupa penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan pada kelompok tani dan para petani yang ada di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Siak dalam membina kelompok tani. beliau mengatakan: “Dinas

Pertanian memberikan penyuluhan pada kelompok tani di Kecamatan Bunga Raya dengan cara memberi bimbingan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK, Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan terhadap kelompok tani, di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. dalam pelaksanaannya kelompok tani dibimbing oleh (Unit Pelaksanaan Teknis Badan Penyuluhan Pertanian) Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak” (Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Siak, 15 Agustus 2020). Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak bahwa dinas terkait telah membantu kegiatan penyuluhan pada kelompok tani yang ada di Bungaraya. Banyak bentuk penyuluhan pertanian yang diberikan pemerintah 62 melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Siak kepada para petani, diantaranya adalah dalam bentuk pelatihan. Sebagaimana yang dikatakan Kepala UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Materi penyuluhan terkait dengan penyusunan RDKK dan pelatihan terhadap kelompok tani kelompok tani juga mendapatkan bimbingan oleh UPTB-PP dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berikut merupakan Tabel dari hasil perencanaan penyuluhan pertanian oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

elama tahun 2019 terdapat 9 jenis kegiatan penyuluhan yang direncanakan dan dilakukan oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak, dan seluruh kegiatan penyuluhan tersebut telah terlaksana. Terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ini beliau juga mengatakan:

“Penyuluhan diberikan langsung pada kelompok tani agar mereka memahami bagaimana cara bertani yang baik dalam prakteknya. Untuk mendukung kegiatan penyuluhan kelompok tani mendapatkan bimbingan dari UPTB PP Kabupaten Siak. Sedangkan bentuk penyuluhan adalah praktek bertani merupakan agenda rutin kita. Bimbingan dalam praktek bertani diberikan untuk kelompok tani kelas pemula dan kelompok tani kelas lanjut. Kami juga memberi bantuan langsung berupa penyediaan lahan, bibit dan pupuk.” (Bapak Sugiharta, S.Pkp, 16 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, bahwa penyuluhan pertanian yang diberikan berupa bimbingan atau praktek bertani langsung. Bimbingan ini dibagi ke dalam kelas pemula dan petani kelas lanjut selain memberikan penyuluhan, kegiatan juga mendapatkan bantuan berupa penyediaan lahan, bibit, juga bantuan pupuk. Hasil wawancara dari salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani menyampaikan bahwa UPTB-PP memberikan praktek dilapangan. Bimbingan Praktek tersebut merupakan kegiatan pelatihan kepada kelompok tani dalam pemilihan bibit, penggunaan dolomit dan penggunaan pupuk. Seperti yang disampaikan oleh bapak Katiman: “Pemerintah memberikan pelatihan untuk kelompok kami sesuai dengan musim taninya. Pemerintah juga memberikan

pelatihan pemilihan bibit unggul, penggunaan dolomit untuk menurunkan PH tanah. Pemerintah juga memberikan pelatihan penggunaan pupuk campuran (pupuk kompos dengan pupuk kimia) sesuai perbandingan takaran pupuk yang digunakan.” (Wawancara Bapak Katiman, 17 Agustus, 2020). Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah melalui dinas terkait memberikan penyuluhan berupa pelatihan yang sesuai dengan rencana tanam. Artinya, jika pada musim tanam petani akan menanam tanaman jagung, maka pemerintah akan memberikan pelatihan tentang cara perawatan dan menanam tanaman seperti padi, jagung dan tanaman lainya yang 64 baik, guna meningkatkan hasil produksi pertanian para petani.

Setelah Melakukan Penyuluhan Dinas Terkait Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak selanjutnya melakukan pembinaan pertanian bagi para petani di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

Penilaian atas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten

Siak Tahun 2019

Pelaksanaan implementasi tersebut terdapat 2 rangkaian kegiatan di wilayah Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang dilakukan oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Program pembinaan dan pengelolaan pertanian Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak mengemukakan bahwa : “Program pembinaan dan pengelolaan pertanian yang dilakukan kepada masyarakat adalah sistem laku pelatihan dan kunjungan) kendala yang dihadapi terletak pada keterbatasan penyuluh serta masyarakat itu sendiri karena sistem kerja otaknya ada di mata, harus melihat secara langsung baru dapat percaya, ”.(Wawancara Bapak Rasdi 20 Agustus 2020) Berdasarkan hasil wawancara dari tim Program pembinaan dan Penyuluhan pertanian dapat disimpulkan bahwa metode yang dilakukan oleh tim Program pembinaan dan pengelolaan pertanian adalah sistem laku (latihan dan kunjungan) kepada masyarakat petani setempat agar dapat memaksimalkan tata cara dalam bertani secara benar sehingga hasil dari pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani, yang menjadi kendala yaitu terletak pada keterbatasan petugas penyuluh di lapangan karena sebagian besar masyarakat sistem kerjanya ada di mata yaitu mereka harus dapat melihat secara langsung baru bisa percaya apa yang diajarkan oleh petugas Program pembinaan dan Penyuluhan pertanian. Keterlaksanaan Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak telah dilakukan dengan maksimal oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan

koordinasi dan relasi dengan kelompok tani di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pelaksanaan yang telah dilakukan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Setiadi, selaku ketua kelompok tani di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, beliau mengatakan bahwa “Jika dinilai dan dilihat bahwa pelaksanaan program penyuluhan pertanian sudah dilakukan dengan baik dan maksimal, hal ini dibuktikan dengan tingkat produksi para petani yang semakin 73 meningkat, artinya penyuluhan yang didapatkan oleh para petani dapat direalisasikan dengan baik, ”.(Wawancara Bapak Rasdi 20 Agustus 2020) Berdasarkan hasil wawancara dari penilaian terhadap pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan diharapkan oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Adapun Fasilitas Penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak adalah berupa Fasilitas yang Memadai Pengembangan kelompok tani tidak hanya melakukan kegiatan rutin pembagian tugas saja, tetapi harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas dapat berupa sumber media yang digunakan penyuluh dalam kegiatan penyuluhan, peralatan pertanian, sarana produksi yang menunjang kelancaran kelompok tani. Fasilitas yang memadai dilihat dari tiga macam, yaitu media yang digunakan penyuluh dalam memberikan informasi, bantuan peralatan pertanian dari pemerintah/ swasta dan pemanfaatan fasilitas. Media

yang digunakan penyuluh dalam memberikan informasi bahwa saat penyuluh di Desa Kemuning Muda menyampaikan informasi ke petani dengan menggunakan media yang cukup. Media yang digunakan dalam kegiatan penyuluh di Desa Kemuning Muda yaitu seperti halnya penyebaran brosur dan buku dirasa sudah cukup menarik bagi petani. Selanjutnya adalah bantuan peralatan pertanian dari pemerintah/swasta bantuan pemerintah sudah cukup dalam memajukan pembangunan di sektor pertanian di Desa Kemuning Muda

Penilaian atas Aktivitas yang telah selesai dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2019

Aktivitas penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dilakukan dengan berbagai macam tema setiap kali sesi penyuluhan, hal ini dilakukan agar petani memiliki banyak pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola hasil pertanian. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang informan Bapak Rasdi dari tim Program pembinaan dan pengelolaan pertanian Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak mengemukakan bahwa : “kami selalu memberikan tema dan materi yang berbeda-beda pada saat penyuluhan, hal ini agar tingkat keberhasilan dan aktivitas yang didapat petani beranekaragam, dan akan semakin memperluas wawasan mereka, ”.(Wawancara Bapak Rasdi 20 Agustus 2020) Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak selalu memberikan penyuluhan

yang berbeda-beda disetiap pertemuan, hal ini agar setelah penyuluhan selesai para petani dapat memiliki banyak kemampuan, dan mereka dapat membedakanya dengan petani lain yang belum mendapatkan penyuluhan. Berikut merupakan 75 tabel hasil kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerja UPTB-PP

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan Hasil kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerja UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dengan target 200 peserta dijelaskan dengan tabel berikut:

Jenis Penyuluh	Jumlah Peserta yang mengikuti	Persentase
Peningkatan Pangan Produksi	126 Orang	63%
Mutu pangan dan Efisiensi Produksinya	130 Orang	65%
Peningkatan Hasil panen yang berkualitas	150 Orang	75%
Produksi pertanian yang efisien dan efektif	155 Orang	77%
Rencana Tanaman Pergiliran	135 Orang	67%
Mengidentifikasi Tanaman Pengendali Hama & Penyakit	120 Orang	60%
agens hayati dan Pemasarakatannya	155 Orang	77%
Pestisida Nabati	165 Orang	82%
Panen dan Pasca Hortikultura Panen	125 Orang	62%

Sumber : Data UPTB-PP Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak
Pencapaian kinerja Dinas Pertanian kabupaten Siak setelah dilaksanakannya penyuluhan dan pembinaan pertanian terlihat pada Pencapaian kinerja sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produksi Tanaman Padi, diperoleh realisasi Tahun 2019 sebesar 40.700 ton dari target sebesar 41.971 ton, sehingga capaian kinerja indikator mencapai 96,97 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu dengan produksi 38.486 ton, maka produksi tahun 2019 meningkat 2.214 ton (naik 5,75 %) dari tahun 2018. Peningkatan produksi disebabkan antara lain :

1. Adanya peningkatan Indeks Pertanaman (IP 200) di beberapa kecamatan seluas 4.747 ha. Jika dibandingkan dengan IP 200 tahun 2017 seluas 3.958 ha, maka terjadi kenaikan seluas 749 ha atau meningkat 16,62 %.

2. Adanya penambahan luas tanam padi melalui beberapa kegiatan yaitu :

a. Penambahan luas tanam melalui Kegiatan Pengembangan Padi Gogo sumber dana APBN Tahun 2019 sebanyak 100 ha berupa varietas padi gogo pada 4 (empat) kecamatan yaitu 2,5 ha untuk Kecamatan Dayun, 10 Ha Kecamatan Kandis, 10 ha

Kecamatan Siak dan 77,5 ha di Kecamatan Sabak Auh.

b. Penambahan luas tanam melalui Kegiatan Pengembangan Padi Inbrida Sawah sumber dana APBN Tahun 2019 sebanyak 1.705,8 ha yang dilaksanakan di Kecamatan Bungaraya seluas 997 ha dan di Kecamatan Sungai Apit seluas 708,8 ha.

3. Adanya penambahan luas tanam palawija melalui beberapa kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Tumpang Sisip Jagung dan Kedelai bantuan APBN pada 2 (dua) Kecamatan Kandis 10 ha dan Kecamatan Dayun 40 ha

b. Bantuan pemerintah benih jagung di lokasi replanting lahan kelapa sawit melalui Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida Bantuan APBN Tahun 2019 total luas 403 ha pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Dayun 126 ha, Kec. Lubuk Dalam 154 ha, dan Kec. Koto Gasib 123 ha.

c. Kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung bantuan APBD I Propinsi Riau seluas 30 ha di Kecamatan Siak Berikut ini wawancara dengan salah seorang informan lain dari tim Program pembinaan dan pengelolaan pertanian Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak mengemukakan bahwa :

“Pembinaan dan penyuluhan pertanian dilakukan di lapangan maupun di pinggir jalan atau dimana ada orang berkumpul, baik di jalan maupun di rumah mereka dengan berdiskusi secara langsung karena pertemuan secara rutin yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.”.(Wawancara 25 Agustus 2020

dengan Bapak Wobowo)

Tolak ukur dari aktivitas penyuluhan yang telah dilakukan oleh UPTB-PP Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak adalah dapat berupa kemampuan dan pengetahuan para petani sebagai peserta dan target penyuluhan program Penyuluhan pertanian di wilayah kerja Kabupaten Siak. Cara mengukur kemampuan para petani yang telah ikut dalam program penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh UPTB-PP Kecamatan Bunga Raya adalah dari keberhasilan petani mengelola dan mengembangkan lahan menjadi lebih beragam dan hasil produksinya semakin meningkat.

Faktor penghambat Evaluasi Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2019

Faktor Internal dalam Keterbatasan Program pembinaan dan Penyuluhan pertanian yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah pelaksana terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana prasarana penyuluhan yang memadai baik jenis maupun jumlahnya sangat dibutuhkan. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 pasal 31 ayat 1, bahwa

untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Dengan melihat pelaksanaan pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian di UPTB-PP Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dilakukan secara merata. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan dari kelompok tani mengemukakan bahwa:

“pelaksanaan pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian di UPTB-PP kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sudah dilakukan secara merata, hal ini dapat dibuktikan dengan hampir semua petani di wilayah kerja Kecamatan Bunga Raya sudah mendapatkan pembinaan dan penyuluhan pertanian dengan baik”.(Wawancara 18 Agustus 2020 Bapak katiman)

Sedangkan faktor eksternal Terkait pentingnya ketersediaan sarana prasarana Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 pasal 31 ayat 1 - 4 telah diatur ketentuan tentang sarana prasarana Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Program Pembinaan dan Pengelolaan Pertanian.

a. Tujuan disusunnya pedoman standar minimal dan pemanfaatan sarana prasarana Program Pembinaan dan Pengelolaan Pertanian pertanian

dalam peraturan menteri tersebut adalah untuk:

b. Memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarana Program Pembinaan dan Pengelolaan Pertanian pertanian;

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana Program Pembinaan dan Pengelolaan Pertanian.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian pemerintah pada tingkat kecamatan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009

dinyatakan bahwa standar minimal sarana dan prasarana Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian kecamatan meliputi : pusat Informasi, peralatan administrasi, alat transportasi kendaraan operasional roda dua, Buku dan Hasil Publikasi, Meubelair, ruangan, rumah dinas, sarana/prasarana pendukung/lingkungan, sumber air bersih, penerangan, jalan lingkungan, pagar halaman, lahan percontohan.

Perda memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembuatan Perda menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan didapat diambil kesimpulan bahwa : Keberhasilan program yang dilaksanakan UPTB PP Kampung

Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dalam bentuk penyuluhan dan pembinaan berdasarkan tujuan yang dibuat sebelumnya telah memiliki tolak ukur, dimana tolak ukur tercapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya. Dengan tolak ukur tersebut, maka perlu adanya evaluasi terhadap penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh UPTB PP Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Keberhasilan terhadap evaluasi kebijakan program penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan UPTB PP Kecamatan Bungaraya bersama dinas terkait, masih menemui beberapa hambatan, hambatan internal dan eksternal tersebut berasal dari petani/kelompok tani itu sendiri.

Faktor Penghambat Faktor penghambat faktor penghambat evaluasi program pembinaan dan Penyuluhan pertanian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor Internal dalam Keterbatasan Program pembinaan dan Penyuluhan pertanian yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah pelaksana terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan sedangkan Sedangkan faktor eksternal terkait pentingnya ketersediaan sarana prasarana Program Pembinaan dan Penyuluhan

Pertanian dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 pasal 31 ayat 1 - 4 telah diatur ketentuan tentang sarana prasarana Program Pembinaan dan Penyuluhan Pertanian pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Program Pembinaan dan Pengelolaan Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson dkk. 1975. *Equity in health service : empirical analysis in sosial policy*. (Cambridge: Ballinger) 54
- Bardach, E. 2008. *A Practical Guide for Policy Analysts: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. Third Edition. CQ Press,
- Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2010. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI)
- Setiawan, 2004, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Siagian, Matias & Suriadi, Agus. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*. Medan: FISIP USU Press.

Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal

Usman, 2002 *Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas,* " Jurnal Administrasi Publik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Program Pembinaan dan Pengelolaan Pertanian

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Undang-Undang

Permentan No.50 tahun 2012

Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2009

Peraturan pemerintah no.43 tahun 2009 tentang

pembiayaan,pembinaan,dan

pengawasan penyuluhan

pertanian,perikanan, dan kehutanan